



diskominfo
handal

humanis - akuntabel - nyaman - digital - agile - literate

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. WONOSOBO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

2023

<https://diskominfo.wonosobokab.go.id/>

(0286) 325112

diskominfo_wonosobo



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo merupakan bentuk pertanggungjawaban dan menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2023 berdasarkan capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan yang merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (*Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026*).

Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam konteks Renstra, namun banyak pula permasalahan dan tantangan yang masih harus diselesaikan. Karena itulah, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang pembangunan, pemerintah dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan visi dan misi satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Seiring berjalannya waktu, tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra mengalami beberapa perubahan kecil sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan kekinian masyarakat yang terjadi beberapa tahun terakhir. Penyesuaian ini diharapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas dan spesifik, dan terukur terhadap kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. LKjIP ini diharapkan menjadi masukan bagi perumusan program dan kebijakan strategis tahun 2024. Tentunya harus diikuti peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta pendorong peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, 28 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WONOSOBO



FAHMI HIDAYAT. S.IP., M.P.P

Pembina

NIP. 197108251999031006

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Eksekutif Summary	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Struktur Organisasi	4
1.5 Tugas dan Fungsi	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Program / Kegiatan 2023.....	9
2.3 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	16
3.2 Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, serta Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, mempunyai tujuan utama yaitu “ meningkatkan kualitas sistem tata kelola komunikasi dan informasi” dan sasaran utama yaitu “ meningkatnya kualitas layanan informasi publik “.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, pada tahun 2023 Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan termasuk didalamnya adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh unsur sekretariat. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai indikator – indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja program.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja tahun 2023, dapat dilihat dari capaian Indikator Sasaran Kinerja Utama Dinas Kominfo. Dari sisi capaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Index SPBE	2,90	3,54
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	91,65	98,28
3	Indek Kepuasan Masyarakat	87,62	95,40
4	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo	71,40	71,50

Capaian Kinerja tahun 2023 semua indikator utama mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Penyerapan anggaran, dari total pagu anggaran belanja langsung setelah perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 10.872.692.483,- dapat terealisasi sebesar Rp. 10.003.688.793,- atau dengan capaian realisasi sebesar 92,03%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya Pembangunan Daerah adalah merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan Nasional, yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan Pemerintah di daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat adalah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman baik sosial budaya, sumber daya maupun kemampuannya yang berbeda, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kedudukan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan.

Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni: pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan *Good Governance* sesuai tuntutan reformasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang

berkembang dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo cukup responsive dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good governance melalui pengembangan *elektronik Government (e-Gov)*, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Wonosobo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat sebagaimana hasil analisa Tim Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo sebagaimana yang ditetapkan adalah melaksanakan kewenangan Daerah di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Berkaitan dengan dinamika pemerintahan dalam kebijakan kepegawaian, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, maka pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonosobo.

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategis yang meliputi keseluruhan pembagian tugas dari masing-masing bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh pegawai

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo yang akan dicapai, sekaligus untuk dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja dalam setiap tahunnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas amanat yang diemban untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Melalui pertanggungjawaban ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam perkembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dalam Tahun Anggaran 2023 dengan maksud sebagai bahan pengambil kebijakan, penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat;
- b. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
10. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonosobo;

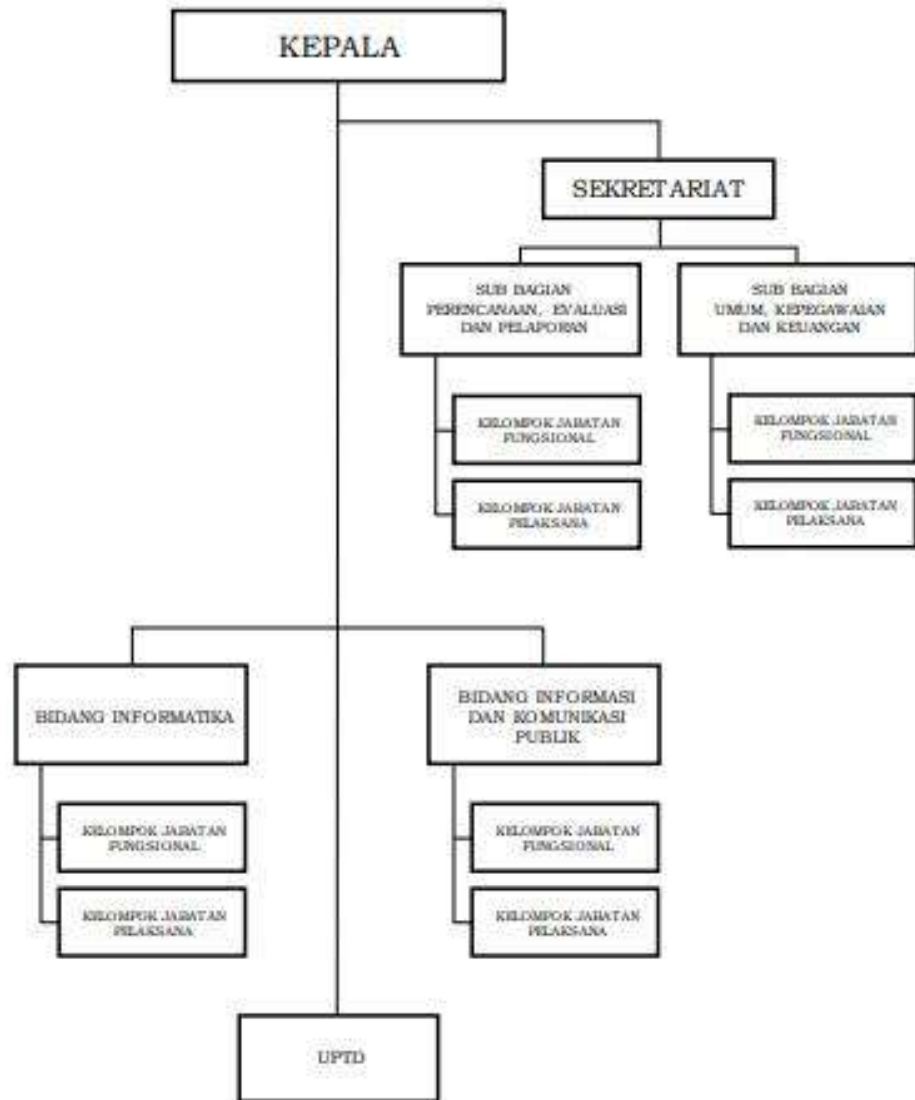
1.4. Struktur Organisasi

Sesuai dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonosobo, kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Dengan susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Informatika;
- d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo



1.5. Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas

Tugas : Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- Fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang informasi komunikasi publik, dan informatika serta kesekretariatan;
- a. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang informasi komunikasi publik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi komunikasi publik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi komunikasi publik dan informatika;
 - d. pelaksanaan pelayanan komunikasi dan informatika;
 - e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
 - f. pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas; dan h. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Tugas dan Fungsi
- 1.6. Susunan Kepegawaian

BAB II : Perencanaan Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Program / Kegiatan
- 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

A. Visi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, dengan mengisyaratkan adanya misi dan tantangan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam menetapkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika merujuk pada pencapaian Misi Kabupaten Wonosobo yaitu **Terwujudnya Wonosobo Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera**. Sistem Informasi Manajemen adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Sistem Informasi dapat berupa gabungan dari beberapa elemen teknologi berbasis komputer yang saling berinteraksi dan bekerja sama berdasarkan suatu prosedur kerja (aturan kerja) yang telah ditetapkan, dimana memproses dan mengolah data menjadi suatu bentuk Informasi yang dapat digunakan dalam mendukung keputusan.

B. Misi

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021 – 2026, semua program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika masuk dalam misi ke-1, yaitu *Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.*

C. Tujuan

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik

D. Sasaran

- a. Terwujudnya pemerintahan yang kapabel
- b. Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik
- c. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel
- d. Meningkatnya pelayanan publik

E. Kebijakan

- a. Implementasi e-government untuk mendukung smart city
- b. Pengelolaan data statistik dan keamanan sistem informasi pemerintah daerah
- c. Peningkatan layanan dan pemanfaatan komunikasi informasi publik
- d. Pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan

2.2. Program / Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023, Program kegiatan yang sudah dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3
2.16.2.20.2.21.01.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.872.692.483
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.846.162.483
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.319.707.623
1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.319.707.623
1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.338.860
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.798.350
1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.540.510
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000
1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000
1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.000.000
1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	384.500.000
1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	384.500.000
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.616.000
1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000
1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.616.000
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.000.000
1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.000.000
1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.000.000
1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.820.000.000
2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.820.000.000
2.2.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	50.000.000
2.2.01.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50.000.000
2.2.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.130.000.000
2.2.01.6	Pelayanan Informasi Publik	170.000.000
2.2.01.7	Layanan Hubungan Media	100.000.000
2.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	50.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
2.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	170.000.000
2.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	95.000.000
2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000
2.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	35.000.000
2.2.01.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30.000.000
2.2.01.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	30.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.000.000
2.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
2.2.01.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	25.000.000
4	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.086.530.000
3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.200.000
3.2.01.1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	14.200.000
3.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.072.330.000
3.2.02.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.800.000
3.2.02.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.107.400.000
3.2.02.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.750.000.000
3.2.02.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	25.000.000
3.2.02.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	32.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
3.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	15.130.000
3.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	125.000.000
Total		10.872.692.483

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan). Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan. Adapun tolak ukurnya adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama yang tertera di tabel berikut

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	66,42	Sekretaris
2	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel	Indeks SPBE	2,99	Kabid Informatika
3	Menguatnya Transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93,50	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
4	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00	Sekretaris

2.4. Perjanjian Kinerja

Permenpan No. 53 Th 2014 menjelaskan yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati.

Perjanjian kinerja merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Kinerja yang disepakati merupakan indikator target kinerja pada tahun yang bersangkutan dan harus sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang pada Rencana Kerja , Rencana Strategis dan RPJMD.

Target kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang harusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan sesuai dokumen perencanaan Rencana Strategis.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja (PK) adalah :

- a. bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen Renstra Diskominfo 2021-2026 terdapat 4 (empat) program untuk mencapai target kinerja, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;

Untuk mewujudkan target kinerja sasaran, program dan kegiatan tahun 2023, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonosobo. Target kinerja meliputi 4 (empat) program terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp. **10.897.172.458,00** terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (lima) kegiatan
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri 1 (satu) dari kegiatan;
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 2 (dua) kegiatan;
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 (tiga) kegiatan;
- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tertera pada tabel berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	66,42
2	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel	Indeks SPBE	2,99
3	Menguatnya Transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93,50
4	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.680.642.458,00
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.870.000.000,00
3	Program Aplikasi Informatika	3.226.530.000,00
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	95.000.000,00
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	25.000.000,00
	Jumlah	10.897.172.458,00

Tabel 2.3
Program dan Anggaran Tahun 2023

No	Program	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.680.642.458,00	4.846.162.483,00
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.870.000.000,00	2.820.000.000,00
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.226.530.000,00	3.086.530.000,00
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	95.000.000,00	95.000.000,00
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	25.000.000,00	25.000.000,00
	Jumlah	10.897.172.458,00	10.872.692.483,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja merupakan indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarnya melalui serangkaian program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur berdasarkan skala yang telah ditentukan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan sesuai Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut (tabel 3.1):

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Evaluasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target

kinerja dengan realisasi kinerja. Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tahun 2023 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dengan Bupati Wonosobo. Pengukuran antara rencana kinerja yang terdapat dalam bab sebelumnya terhadap realisasinya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel	Indeks SPBE	2,99	3,54	118%	2,98	3,02	117%
2	Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	91,50	98,28	107%	91,65	95,00	103%
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	66,42	71,50	108%	71,40	72,47	99%
4	Meningkatnya pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	83,00	95,40	115%	87,62	84,50	113%

Tabel 3.3 Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Diskominfo Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

No.	Pencapaian IKU			Anggaran		
	Sasaran Strategis	Indikator	Pencapaian terhadap Target (%)	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel	Indeks SPBE	118%	3.206.530.000,00	2.934.138.147,00	91,51%
2	Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Nilai KIP	107%	2.820.000.000,00	2.779.452.957,00	98,56%

No.	Pencapaian IKU			Anggaran		
	Sasaran Strategis	Indikator	Pencapaian terhadap Target (%)	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	108%	3.719.707.623,00	3.185.832.083,00	85,65%
4	Meningkatnya pelayanan publik	IKM	115%	1.126.454.860,00	1.104.265.606,00	98,03%
	JUMLAH			10.872.692.483,00	10.003.688.793,00	92,01%

Berdasarkan tabel diatas, evaluasi penyelenggaraan SPBE tahun 2023 oleh Kementerian PAN dan RB, indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan nilai 3,54 (predikat Sangat Baik) yang meningkat dari tahun 2022 dengan capaian indeks 2,90 (predikat Baik).

Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 berhasil meraih penghargaan predikat tertinggi pada Evaluasi Keterbukaan Publik oleh Komisi Informasi Jawa Tengah, yakni sebagai Badan Publik “Informatif” pada penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut mempertahankan capaian yang telah diraih pada tahun 2022 dengan peningkatan nilai sebelumnya nilai pada tahun 2022 adalah 91,50 sedangkan pada tahun 2023 nilai yang diraih adalah 98,28.

Disamping itu dengan serapan anggaran mencapai 92,01 %, capaian termasuk kategori tinggi. Dengan melihat hasil capaian kinerja dan serapan anggaran maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan efisiensi anggaran dengan optimal. “Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Badan Kepegawaian Daerah telah meningkatkan efisiensi dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses dan meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran. Efisiensi dalam penggunaan dana publik menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sumber daya yang

terbatas.

Secara lebih rinci, evaluasi dan analisis terhadap capaian indikator perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1: Terwujudnya pemerintahan yang kapabel

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari 1 indikator, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel	Indeks SPBE	2,99	3,54	122%	2,98	3,02	117%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator Indeks SPBE untuk tahun 2023 telah tercapai.

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Kinerja Tahun 2023, dibawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian tersebut;

a. Perbandingan antara realisasi Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya capaian tahun 2023 mengalami peningkatan yang berarti. Adapun rincian realisasi tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2022	2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
1	Indeks SPBE	2,90	2,32	2,94	2,94

b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026

Dilihat dari target RPJMD, realisasi capaian indeks SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar 117%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan dan kegagalan

Berdasarkan beberapa data yang telah disebutkan sebelumnya bahwa capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran strategis terwujudnya pemerintahan yang kapabel dengan indikator kinerja Indeks SPBE adalah sangat baik.

Realisasi capaian mencapai 122% dari target 2,99 tercapai 3,54. Hal ini karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo telah berupaya meningkatkan layanan dalam rangka mencapai SPBE.

d. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika diarahkan untuk peningkatan layanan internal pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK melalui menerapkan SPBE secara menyeluruh dan terpadu.

Indeks SPBE mencakup : domain (1) kebijakan internal; (2) tata kelola; (3) manajemen SPBE; dan (4) layanan SPBE. Berikut penjelasan capaian indeks masing-masing domain :

1) Nilai Kebijakan Internal

Nilai Kebijakan internal menggambarkan tingkat kematangan kebijakan penyelenggaraan SPBE mencakup seluruh pengaturan dalam Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Nilai Kebijakan Internal mencapai angka 3 dari skala tertinggi 5, kurang dari target yang telah ditetapkan. Penyebabnya adalah masih terdapat materi kebijakan internal SPBE yang harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi sekarang. Kegiatan untuk meningkatkan kematangan kebijakan internal meliputi : (1) penetapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE; (2) pembentukan Tim Audit Internal SPBE; (3) penetapan Tim Koordinator Penyelenggaraan SPBE oleh

Bupati serta (4) penetapan SOP penyelenggaraan SPBE. Untuk meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal SPBE adalah dengan melakukan review dan merumuskan penyesuaian materi kebijakan internal.

2) Nilai Tata Kelola

Nilai Tata Kelola menggambarkan tingkat kematangan SPBE yang mencakup perencanaan strategis SPBE, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan kinerja penyelenggara SPBE. Nilai tata kelola mencapai angka 3,10 melebihi target yang telah ditetapkan. Upaya untuk meningkatkan tata kelola SPBE mencakup kegiatan : (1) penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE; (2) pemantauan dan evaluasi SPBE; (3) optimalisasi Pusat Data Pemerintah dengan memanfaatkan Pusat Data Nasional serta perluasan jaringan intranet fiber optik pemerintah daerah menjadi 24 perangkat daerah yang terhubung; (4) pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mengintegrasikan aplikasi layanan pemerintah; (5) mengintensifkan penyelenggaraan forum koordinasi SPBE kepada semua perangkat daerah.

3) Nilai Manajemen

Nilai manajemen menggambarkan tingkat kematangan dalam pengelolaan manajemen SPBE yang mencakup : (1) manajemen risiko; (2) manajemen keamanan informasi; (3) manajemen data; (4) manajemen aset TIK (5) manajemen SDM; (6) manajemen pengetahuan; (7) manajemen perubahan; (8) manajemen layanan. Nilai indeks manajemen mencapai angka 3,18 melebihi target yang telah ditetapkan. Penerapan manajemen SPBE yang telah dilakukan mencakup: (1) kegiatan peningkatan kepedulian dan kesadaran keamanan informasi kepala perangkat daerah selaku penyelenggara dan pengguna SPBE; (2) pelatihan dan sosialisasi penanganan insiden siber kepada pengelola TIK perangkat daerah (Anggota Tim CSIRT); (3) penyusunan design keamanan informasi, (4) *assessment* internal indeks KAMI; (5) penyelenggaraan satu data berbasis desa dan Open Data terintegrasi dengan pusat; (6)

penataan manajemen aset TIK; (7) pemenuhan kebutuhan SDM TIK dan peningkatan kompetensinya; (8) menyusun repository file untuk manajemen pengetahuan; (9) menyusun prosedur manajemen perubahan; (10) menambah layanan TIK.

4) Nilai Layanan SPBE

Nilai Layanan SPBE menggambarkan tingkat kematangan kapabilitas fungsi layanan pemerintah dan layanan publik berbasis elektronik yang mencakup : (1) layanan administrasi pemerintahan dan (2) layanan publik berbasis elektronik . Untuk nilai layanan mencapai angka 4,07, melebihi target yang telah ditetapkan. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik yang telah diterapkan mencakup layanan perencanaan (aplikasi SIPD), penganggaran (aplikasi SIPD), keuangan (aplikasi SIPD), aset (aplikasi Simda Aset), pengadaan barang dan jasa (aplikasi LPSE-PBJ), layanan kepegawaian (aplikasi Simpeg dan SIASN), layanan kearsipan (aplikasi SriKandi), layanan pengawasan internal (aplikasi SIMWAS), layanan akuntabilitas kinerja (aplikasi ESR) dan layanan kinerja pegawai (e-SKP dan e-presensi) telah memberikan dampak administratif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Selanjutnya layanan publik berbasis elektronik juga memberikan peningkatan nilai layanan yang mencakup : (1) layanan pengaduan publik (aplikasi LaporBupati); (2) layanan data terbuka (aplikasi Satu Data); (3) layanan informasi dokumentasi hukum (aplikasi JDIH); (4) layanan penerimaan peserta didik baru (aplikasi PPDB on-line); (5) aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM); (6) aplikasi pelayanan perizinan on-line (Aprizob). Untuk meningkatkan layanan maka terus dilakukan pengembangan aplikasi layanan untuk mendukung kinerja pemerintahan maupun layanan publik seperti layanan perizinan dan investasi, layanan kerjasama daerah, layanan promosi UMKM melalui AyoPromo, portal Satu Data dan integrasinya ke Pusat. Terus mengupayakan penggunaan aplikasi umum pemerintah pusat seperti penerapan TNDE SriKandi, SIPD, SP4NLapor, LPSE,

SIRUP serta menginventarisasi aplikasi khusus pemerintah daerah yang telah dikembangkan untuk bisa dilakukan integrasi dan keterpaduan layanan.

2. Sasaran strategis 2: Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	91,50	98,28	107%	91,65	95,00	103%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk tahun 2023 telah melebihi target yaitu sebesar 107%.

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Kinerja Tahun 2023, dibawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian tersebut;

a. Perbandingan antara realisasi Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya capaian tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat berarti. Adapun rincian realisasi tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan Tahun tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2022	2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	91,65	84,4	-	83,02

b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026

Dilihat dari target RPJMD, realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk sasaran ke 2 “Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik” dengan Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah sangat baik yaitu mencapai 103%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan dan kegagalan

Berdasarkan beberapa data yang telah disebutkan sebelumnya bahwa capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran strategis “Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik” dengan indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah sangat baik.

Realisasi capaian mencapai 107% dari target 93,5 tercapai 98,28. Hal ini karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo telah berupaya meningkatkan tranparansi informasi publik dan komunikasi publik.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mendukung visi terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera dalam rangka mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dengan sasaran menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Realisasi capaian 107% dari target 93,5 dan tercapai 98,28, merupakan hasil kerja bersama keluarga besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.

Capain ini diperoleh setelah mengikuti berbagai rangkaian penilaian mulai dari penilaian sosial media dan website, pengisian *Self Assessment Questionare* (SAQ), visitasi atau kunjungan lapangan oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan terakhir

melalui forum uji publik yaitu pemaparan Bupati Wonosobo tentang komitmen, inovasi dan berbagai capaian dalam pelaksanaan/implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo.

Dalam tahapan pengisian *self assessment questionnaire (SAQ)* indikator aksesibilitas website. Penyediaan informasi setiap saat dan kelembagaan PPID mendapatkan nilai penuh (100). Dengan rincian indikator yang dipenuhi meliputi:

- 1) Penyediaan aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis website yang dapat diakses untuk umum dilengkapi dengan fitur ramah disabilitas;
- 2) Memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan 2023 (format sesuai dengan PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
- 3) Menyediakan peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
- 4) Memiliki Perbup tentang Pelayanan Informasi Publik
- 5) Memiliki Surat Keputusan Pembentukan dan Penunjukan PPID yang terdiri dari Atasan PPID, PPID dan PPID Pelaksana sebagaimana diatur dalam Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6) Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi ke -PPID-an, yang sekurang-kurangnya diperuntukan untuk bimtek atau sejenisnya, honor pelaksana, up grading sarana prasarana IT, rapat-rapat dan hal lain terkait penguatan kelembagaan

Mengelola urusan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat memerlukan inovasi dan kreatifitas yang tidak boleh berhenti, untuk itu membekali sumber daya manusia/aparatur yang bertugas menyusun berbagai konten edukasi publik harus terus dilakukan. Pada Tahun 2023 salah satu upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan Diskominfo adalah membekali petugas Pelayanan Informasi Publik, kru Wonosobo WebTV dan penyiar Radio Pesona kemampuan berbahasa isyarat. Bekerjasama dengan Gerakan Tuna Rungu untuk Indonesia (Gerkatina) Wonosobo, Diskominfo berupaya memberikan pelayanan informasi publik kepada seluruh kalangan

masyarakat termasuk teman-teman penyandang disabilitas dalam hal ini teman-teman tuli. Berbagai program lain juga akan terus dilaksanakan sebagai upaya untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo

3. Sasaran strategis 3: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	66,42	71,50	108%	71,40	72,47	99%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator Nilai SAKIP untuk tahun 2023 tercapai.

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Kinerja Tahun 2023, dibawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian tersebut;

a. Perbandingan antara realisasi Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya capaian tahun 2023 mengalami peningkatan yang berarti. Adapun rincian realisasi tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi
----	-------------------	-----------

		2022	2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP	71,4	66,47	-	-

b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026

Tahun 2023 adalah tahun ketiga RPJMD dan Renstra 2021-2026 sehingga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan nilai dari tahun sebelumnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan dan kegagalan

Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hal ini dikarenakan terus melakukan perubahan dalam semua aspek SAKIP mulai dari kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi sampai dengan memastikan capaian kinerja sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan. Disamping itu pemahaman tentang SAKIP di berikan pada tiap-tiap personil untuk menumbuhkan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan masing-masing individu.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

SAKIP ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sehingga ada kegiatan yang mendukung pencapaian nilai SAKIP antara lain adalah adanya kegiatan rapat rutin untuk mengevaluasi dan melakukan pengukuran kinerja di masing bidang dan individu.

4. Sasaran strategis 4: Meningkatnya pelayanan publik

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	83,00	97,09	115%	87,62	84,50	113%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk tahun 2023 dapat tercapai bahkan melebihi target, yaitu pada tahun 2023 targetnya adalah 83,00 sedangkan capaian tahun 2023 adalah 97,09 sehingga persentase capaiannya adalah 115%.

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Kinerja Tahun 2023, dibawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian tersebut;

a. Perbandingan antara realisasi Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Dilihat dari capaian tahun lalu terlihat bahwa capaian kinerja tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Bahkan melampaui target akhir RPJMD.

Tabel. 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2022	2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,62	86,4	-	84,8

b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026

Dilihat dari target RPJMD bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika capaiannya sangat baik untuk sasaran ke 2 yaitu “Meningkatnya pelayanan publik”, karena telah mencapai target kinerja.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan dan kegagalan

Realisasi capaian mencapai 101% dari target 86,4 tercapai 87,62. Hal ini karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo telah meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik dengan penambahan modul pada aplikasi online sehingga diharapkan mempermudah layanan, disamping itu ada komitmen bersama semua personil Dinas Komunikasi dan Informatika untuk bersikap melayani memberikan pelayanan dengan senyum sepenuh hati.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

IKM ditunjang dengan program penunjang urusan daerah sehingga ada kegiatan yang mendukung pencapaian nilai IKM antara lain adalah adanya kegiatan rapat rutin untuk mengevaluasi dan melakukan pengukuran kinerja di masing bidang dan individu.

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. **10.872.692.483,00** (anggaran perubahan APBD) yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.12 Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.675.565.880	1.640.130.882	97,89
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.927.158.770	1.902.263.766	98,71
3	Program penyelenggaraan statistik sektoral	42.790.000	38.135.000	89,12

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	40.000.000	35.477.065	88,69
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.140.208.332	3.815.346.234	92,15

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2022 (diolah)

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, komposisi pagu dan realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.13 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobon Tahun 2023

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
			Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10.872.692.483		10.003.688.793		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.846.162.483		4.290.097.689		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.319.707.623		2.793.122.996		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 org/bln	3.319.707.623	23	2.793.122.996,00	100%	84,14%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			400.000.000		392.709.087		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (DBHCHT)		500 org	400.000.000	500	392.709.087	100%	98,18%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			245.338.860		244.676.039		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.798.350	1	8.791.270	100%	99,92%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.540.510	1	80.302.316	100%	99,70%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	1	29.834.690	100%	99,45%

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
			Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	148 Dokumen	13.000.000	1484	12.840.000	100%	98,77%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	113.000.000	12	112.907.763	100%	99,92%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			384.500.000		384.070.050		99,89%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	384.500.000	22	384.070.050	100%	99,89%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			310.616.000		289.707.318		93,27%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	12	2.828.500	100%	94,28%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	12	45.643.667	100%	91,29%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	257.616.000	12	241.235.151	100%	93,64%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			186.000.000		185.812.199,00		99,90%

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
			Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	82.000.000	13	81.747.399	100%	99,69%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.000.000	1	73.975.000	100%	99,97%
	1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	30.000.000	4	29.989.800	100%	99,97%
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik			2.820.000.000		2.779.452.957		98,56%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.820.000.000		2.779.452.957		98,56%
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	3 Dokumen	50.000.000	3	40.886.890	100%	81,77%
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	50.000.000	1	49.515.560	100%	99,03%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	2.130.000.000	3	2.109.595.143	100%	99,04%

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
			Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	170.000.000	3	165.725.134	100%	97,49%
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan	100.000.000	2	98.820.580	100%	98,82%
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	2 Dokumen	50.000.000	2	49.809.800	100%	99,62%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4 Dokumen	170.000.000	4	169.999.850	100%	100,00%
r	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17 Unit	100.000.000	17	95.100.000	100%	95,10%
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			3.086.530.000		2.823.078.137		91,46%
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			14.200.000		13.432.490		94,60%
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain	1 domain	14.200.000	1	13.432.490	100%	94,60%

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
			Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemerintah Kabupaten/Kota						
	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.072.330.000		2.809.645.647		91,45%
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>E - Government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	17.800.000	4	17.569.800	100%	98,71%
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1.107.400.000	1	1.020.173.543	100%	92,12%
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.750.000.000	1	1.581.161.184	100%	90,35%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah]Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	3 Dokumen	25.000.000	3	21.956.700	100%	87,83%
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	1 Dokumen	32.000.000	1	31.585.000	100%	98,70%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber	4 Dokumen	15.130.000	4	14.845.200	100%	98,12%

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
			Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen	125.000.000	2	122.354.220	100%	97,88%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			95.000.000		91.050.010		95,84%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			95.000.000		91.050.010		95,84%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	35.000.000	1	32.936.310	100%	94,10%
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40 orang	30.000.000	40	28.851.400	100%	96,17%
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	30.000.000	1	29.262.300	100%	97,54%
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			25.000.000		20.010.000		80,04%

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
			Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000		20.010.000		80,04%
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Lap	25.000.000	1	20.010.000	100%	80,04%
	JUMLAH PAGU			10.872.692.483		10.003.688.793		92,01%

Berdasarkan informasi pada tabel 3.14, bahwa dari total pagu anggaran belanja langsung setelah perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 10.872.692.483,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 10.003.688.793,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 92,01%.

Persentase penyerapan belanja anggaran pada Tahun 2023 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan penyerapan belanja anggaran Tahun 2022 dengan tingkat persentase 94,96%.

Secara lebih rinci, capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023, Diskominfo mendapatkan alokasi anggaran dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCHT), yang secara nomenklatur anggaran masuk ke dalam belanja administrasi kepegawaian di Sekretariat Diskominfo.

Salah satu latar belakang kegiatan DBHCHT adalah sinyalemen bahwa peningkatan produksi rokok di Indonesia disinyalir tidak diiringi dengan kenaikan cukai yang sebanding, yang salah satu penyebabnya adalah karena keberadaan rokok ilegal. Secara geografis, Kabupaten Wonosobo dengan mayoritas wilayah pedesaan berpotensi menjadi daerah perlintasan dan peredaran rokok ilegal, sehingga diperlukan langkah preventif melalui diseminasi informasi yang komprehensif dengan memanfaatkan media komunikasi elektronik dan non elektronik serta memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang dapat menyentuh ke lapisan masyarakat di pedesaan untuk dapat mensosialisasikan ketentuan perundang-undangan terkait cukai/rokok ilegal dengan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pada tahun 2023 Diskominfo melaksanakan kegiatan sosialisasi bekerja sama dengan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra) dengan melaksanakan pertunjukan kesenian rakyat dan lomba video sosialisasi "gempur rokok ilegal". Sosialisasi dalam bentuk pementasan dilaksanakan di enam lokasi yang berbeda yaitu Kelurahan Sruni Kecamatan Wonosobo,

Keseneng Kecamatan Mojotengah, Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro, Desa Kadipaten Kecamatan Selomerto, Desa Prumbanan dan Desa Reco Kecamatan Kretek. Sosialisasi dalam bentuk pementasan kesenian rakyat sukses mendatangkan banyak warga masyarakat, selain itu setiap kegiatan pementasan di dokumentasikan dalam bentuk video yang diunggah di kanal Youtube Official WEB TV Wonosobo.

Selain bekerjasama dengan FK Metra, Diskominfo juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan mengundang 43 kelompok informasi masyarakat (KIM) dan pengurus karang taruna yang ada di Kabupaten Wonosobo. Diseminasi informasi kepada komunitas dan kelompok masyarakat sangat penting untuk mempercepat penyampaian informasi terkait ketentuan mengenai cukai/rokok ilegal.

Di samping itu, bekerjasama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang memiliki desa binaan sadar hukum, Diskominfo juga menggelar *talk show* dalam rangka sosialisasi "gempur rokok ilegal" di 4 Desa yaitu Kelurahan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang, Desa Gambaran Kecamatan Kaliwiro, Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto dan Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah. Melalui kegiatan *talk show* terjadi diskusi interaktif antara warga masyarakat dengan narasumber dari Kantor Bea Cukai Magelang, Satpol PP dan Sekretariat Daerah.

Tidak hanya melalui pelaksanaan kegiatan *off-air*, Diskominfo juga mendukung pelaksanaan sosialisasi ketentuan perundang-undangan tentang cukai lewat berbagai konten yang di produksi melalui sosial media, advertorial melalui media *mainstream* dan juga media fisik dalam bentuk kalender dan kaos.

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Substansi program ini sebenarnya lebih luas daripada sekedar pengelolaan aplikasi informatika, karena terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang merupakan kebijakan dasar dan berlaku secara nasional untuk pengembangan pemerintahan secara elektronik. Dalam konteks ini, Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai panduan bagi pemerintahan daerah untuk melakukan pengarusutamaan dan penerapan SPBE. Secara umum, penerapan SPBE bertujuan untuk: (1)

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (2) mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan (3) meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Dalam penerapannya, terdapat 4 (empat) domain yang harus diperkuat dalam SPBE, yaitu: (1) kebijakan internal, (2) tata kelola, (3) manajemen SPBE; dan (4) layanan SPBE.

Relevan dengan hal tersebut, di Wonosobo program pengelolaan aplikasi informatika diarahkan untuk peningkatan layanan internal pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK melalui menerapkan SPBE secara menyeluruh dan terpadu, dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- Langganan penyedia domain, aplikasi manajemen hosting, sertifikat enkripsi data, berlangganan aplikasi *video conference* (Zoom Meeting) untuk mendukung layanan pusat data pemerintah. Keluaran dari kegiatan ini adalah tercukupinya kebutuhan domain sejumlah empat unit, sertifikat SSL sebanyak dua unit, *template* aplikasi empat unit, serta tiga unit akun *zoom meeting*.
- Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, dengan kegiatan inventarisasi dan identifikasi penyelenggaraan SPBE yang mencakup 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator evaluasi penyelenggaraan SPBE. Keluaran kegiatan ini adalah terpenuhinya indikator penilaian SPBE tahun 2023.
- Pengelolaan pusat data Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menjamin keberlangsungan operasional layanan pusat data pemerintah kepada perangkat daerah dan masyarakat dengan berlangganan internet kepada jasa penyedia internet sebesar 350 Mbps, fasilitasi tenaga operasional pusat data sebanyak dua orang, pemeliharaan prasarana pendukung operasional generator set (genset) dan AC masing-masing satu unit.
- Memberikan layanan panggilan terpusat (*call center*) 112 serta pengelolaan akun media sosial bisnis untuk mendukung fitur aplikasi layanan Diskominfo. Keluaran kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan *call center* 112 selama satu tahun dan akun *Whatsapp* bisnis selama sembilan bulan;
- Peningkatan cakupan area jaringan intranet pemerintah daerah dengan membangun sambungan baru ke Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Perhubungan di Andongsili sepanjang 2 km, perbaikan jaringan pendopo wakil bupati, rumah dinas Selomanik, Kodim 0707/Wonosobo dan Koramil Wonosobo, pemasangan jaringan baru pada gedung mal pelayanan publik (MPP) termasuk perangkat pendukungnya, penambahan jaringan CCTV sejumlah 12 titik pada area Perempatan Kauman Utara dan Tugu Nol KM, serta jalur Kertek-Parakan;

- Sosialisasi dan pelatihan keamanan informasi untuk mendukung penerapan manajemen keamanan informasi dalam penerapan SPBE. Kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran keamanan informasi kepada seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Pelatihan keamanan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan skill tentang segala bentuk ancaman serangan siber dan kerentanan sistem sehingga bisa dilakukan mitigasi risiko secepatnya. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan koordinasi aktif dengan instansi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dalam bidang penerapan manajemen keamanan informasi.
- Pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dalam pengelolaan TIK dalam bidang pengelolaan program *smart city* (kota cerdas) dengan peserta 30 orang, analisis media sosial dengan jumlah peserta 30 orang dan keamanan informasi satu orang.
- Kolaborasi dalam literasi digital dengan forum relawan teknologi informasi dan komunikasi (RTIK) Wonosobo, generasi digital Wonosobo (Gradasi) dan paguyuban pegiat sistem informasi desa (PPID) Wonosobo berupa penyampaian program-program literasi digital ke masyarakat;
- Pengembangan ekosistem SPBE untuk memantapkan area arsitektur SPBE yang mencakup kegiatan Audit TIK SPBE pada aspek infrastruktur jaringan intranet dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), penyusunan dokumen desain keamanan informasi yang menjadi rujukan dalam penerapan manajemen keamanan informasi SPBE. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya satu dokumen desain keamanan informasi serta laporan audit TIK sebanyak satu dokumen.
- Pengembangan aplikasi perizinan Wonosobo (Aprizob) untuk mendukung Mal Pelayanan Publik (MPP), aplikasi tata kelola kerjasama daerah (Asik-

Sobo), aplikasi promosi usaha UMKM (AyoPromo), aplikasi untuk aksi berbagi dan kolaborasi (Sobo-Aksi), aplikasi untuk pencarian informasi tentang Wonosobo (SoboPedia), pengembangan website baru kepada lima perangkat daerah, 14 puskesmas, dan satu sekolah dasar, pengembangan aplikasi layanan pada Diskominfo.

- Integrasi data melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP) yang mencakup aplikasi Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN pusat serta integrasi data antara OpenData Wonosobo dengan portal Satu Data Indonesia.
- Koordinasi penyelenggaraan program *Smart City* dengan seluruh perangkat daerah untuk pemantauan dan evaluasi serta untuk mendorong pencapaian rencana aksi program *Smart City* yang tercantum dalam peta rencana.

3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mendukung visi terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera dalam rangka mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dengan sasaran menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Beberapa program strategis yang dilaksanakan dalam program pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik pada tahun 2023 yaitu:

- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat yang semakin berkembang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo perlu diperbaharui. Upaya pembaruan melalui penetapan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2007 tentang LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan, meski demikian Perda Perubahan yang ada belum memberikan kejelasan terkait status badan hukum LPPL Radio Pesona FM

Kabupaten Wonosobo. Untuk dapat memberikan performance terbaik, pengelolaan LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo memerlukan dukungan dasar hukum yang mampu dijadikan rujukan untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaan LPPL.

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Mengetahui efektifitas dan segmentasi masing-masing media akan membantu Diskominfo dalam memilih media apa yang lebih tepat digunakan untuk menyampaikan informasi. Sebagai contoh dalam kasus penanganan stunting dengan audience yang dituju adalah ibu hamil, ibu menyusui, tenaga kesehatan desa, apabila sudah mengetahui segmentasi dari tiap media, maka Diskominfo dapat memilih strategi komunikasi yang paling tepat untuk menyampaikan informasi tentang stunting. Memiliki pemetaan segmentasi media berdasarkan kawasan dan wilayah juga diperlukan, mengetahui segmentasi penggunaan media untuk daerah perkotaan atau pedesaan akan membantu Diskominfo dalam memilih jenis media apa yang paling cocok untuk digunakan. Untuk memperoleh data dan informasi tersebut perlu dilakukan penelitian secara komprehensif dengan responden adalah masyarakat wonosobo.

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Angka kemiskinan Wonosobo yang masih cukup tinggi yang disertai dengan angka literasi rendah memberi ruang bagi kinerja pengelolaan media komunikasi publik. Kinerja media komunikasi publik diharapkan memberikan dampak pada kecerdasan dan kesejahteraan warga Wonosobo. Kegiatan pengelolaan media komunikasi publik memanfaatkan kanal informasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo antara lain Radio Pesona FM, Channel Youtube OfficialWonosoboWebTV, Media Sosial Wonosobo Hebat, baliho serta optimalisasi kerjasama dengan pers.

- Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi mempunyai sumbangan yang penting dalam tata kelola pemerintah yang baik. Adanya keterbukaan informasi publik mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang

sebaik-baiknya, serta dapat mempercepat perwujudan pemerintah yang terbuka dalam upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2023, fokus kerja pelayanan informasi publik antara lain tata kelola layanan informasi dengan target predikat Informatif selain itu membuka akses komunikasi publik melalui Laporan Bupati Wonosobo.

- Layanan Hubungan Media

Hubungan yang harmonis antara Pemda dengan media sangat menentukan pembangunan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Wonosobo, untuk itu penguatan sinergi antara Diskominfo dan Wartawan perlu dilakukan. Dalam bekerja wartawan berdasarkan dengan kode etik jurnalistik jadi tahu mana yang abu-abu mana yang gelap mana yang terang. Wartawan memiliki peran menjadi *check balance* nya pemerintah, sebab bisa melihat situasi di lapangan dengan jernih untuk masukan dan evaluasi kebijakan yang ada.

- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik diselenggarakan untuk mengoptimalkan peran Diskominfo dalam menyebarluaskan Informasi pembangunan dan program yang dilaksanakan. kegiatan tersebut untuk meningkatkan sumber daya manusia di Diskominfo dalam menyampaikan informasi publik. Memberikan pemahaman bahwa informasi/ kegiatan harus disampaikan ke publik, sehingga dapat diketahui masyarakat luas, termasuk bagi teman-teman penyandang Disabilitas

- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*), pemanfaatan TIK di dalam kegiatan pemerintahan tidak dapat dihindarkan. Salah satu pilar untuk mewujudkan program pemerintah tersebut adalah keterbukaan informasi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) memiliki peran strategis dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi dan keterbukaan informasi, sebab pemerintah tidak bisa berjalan sendiri.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program penyelenggaraan statistik sektoral diarahkan untuk menyediakan data-data sektoral Pemerintah Kabupaten Wonosobo secara lengkap sebagai bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran program, yaitu :

- mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dengan keluaran pelatihan bagi admin Desa Cantik sejumlah 132 orang, desk evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS). Dalam mewujudkan data statistik sektoral yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga sedang membangun platform Satu Data Wonosobo dengan menerapkan Satu Data Desa berbasis Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) kepada seluruh desa dan kelurahan sejumlah 236 desa/kelurahan. Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 2021, platform Desa Cantik sudah diterapkan kepada 61 desa di 15 kecamatan dan akan terus dikembangkan pada 2024. Dalam perkembangannya, platform Desa Cantik akan dikolaborasikan dengan layanan digital lainnya yang sudah ada menggunakan platform Sistem Informasi Desa (Open SID) yang telah diinisiasi dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa Adiwarno, Gunungtawang, Semayu serta beberapa desa di Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Leksono.
- mengoordinasikan seluruh perangkat daerah selaku produsen data untuk menetapkan jumlah dan jenis data yang dihasilkan oleh perangkat daerah termasuk data-data untuk pengukuran kinerja perangkat daerah serta penyebarluasan data melalui portal Open Data dan Satu Data Wonsobo.
- meningkatkan kapasitas SDM pemerintah daerah untuk peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi melalui pelatihan statistik yang mencakup pelatihan penyusunan metadata statistik dan pelatihan pengelolaan data spasial kepada perangkat daerah, pelatihan bagi admin desa dalam penyelenggaraan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) sejumlah 132 desa. Pelatihan pengelolaan data geospasial yang terintegrasikan dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang merupakan bagian dari penerapan Satu Data Indonesia bagi 25

perangkat daerah.

- Sebagai media penyebarluasan data, pemerintah juga mengembangkan portal satu data Wonosobo yang terintegrasi dengan data perencanaan dan capaian kinerja perangkat daerah. Portal satu data Wonosobo juga telah terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia Pusat (SDI) sebagai media penyebarluasan data nasional.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanann Informasi

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran program penyelenggaraan persandian , yaitu :

- untuk memperkuat tata kelola pengamanan informasi disusun kebijakan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 500.12.6/191/2023 serta Nomor : 500.12.6/190/2023 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen design keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023, sebagai pedoman penyeleggaraan keamanan informasi;
- untuk meningkatkan kapasitas SDM pengamanan informasi, dilakukan pelatihan tentang berbagai konsep dasar keamanan sistem informasi, mitigasi risiko dari serangan siber kepada 33 perangkat daerah termasuk Bagian di Lingkungan Setda Kabupten Wonosobo dengan narasumber ahli keamanan siber BSSN;
- untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulaaian keamanan informasi kepada seluruh perangkat daerah dilakukan sosialisasi kesadaran keamanan informasi kepala Kepala Perangkat Daerah dan Camat sejumlah 48 orang. Sosialisasi dengan mendatangkan narasumber ahli bidang keamaman siber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain materi keamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE, peserta sosialisasi didorong untuk menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagai bagian pengamanan dokumen elektronik. Pemerintah juga terus memberikan edukasi tentang keamanan informasi baik kepada internal pemerintah maupun masyarakat melalui kanal media sosial dan website;
- untuk memperkuat pengelolaan risiko keamanan informasi, dilakukan audit internal TIK pada aspek infrastruktur jaringan intranet dan

penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP);

Adapun beberapa permasalahan yang menyebabkan realisasi serapan anggaran beberapa kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tahun 2023 belum optimal adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Untuk memenuhi kebutuhan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN serta memenuhi pembayaran jasa tenaga PTT dan THL selama satu tahun anggaran.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.319.707.623,00 kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 2.793.122.996,00 atau sebesar 84,14%. Kendala yang dihadapi pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah

1. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Untuk menjamin komunikasi data dan informasi antara pusat data dengan OPD serta menyediakan akses internet kepada OPD.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.750.000.000,00 kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 1.581.161.184,00 atau sebesar 90,35%. Penyebab realisasi tidak mencapai 100% karena kendala perekrutan tenaga TIK Programmer yang tercukupi hanya 3 orang dari 5 orang yang ditargetkan sehingga Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi menjadi tidak terserap serta terdapat pengalihan status Tenaga Non ASN menjadi ASN sejumlah 2 orang..

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, statistik dan persandian.

Laporan Kinerja Dinass Kominfo Kabupaten Wonosobo tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2023.

Laporan Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

1.2 Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebaiknya penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun alokasi anggaran), langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu – isu strategis di bidang informasi dan Komunikasi publik, statistik dan persandian;
2. Perencanaan yang matang, partisipasi publik, evaluasi berkala, penerapan teknologi informasi, dan koordinasi yang baik menjadi beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran;
3. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama, kolaborasi dengan berbagai instansi terkait (terutama dengan instansi pusat), agar program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan optimal.